

MONITORING DAN EVALUASI KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI WILAYAH JAKARTA PUSAT

Dani Vardiansyah Noor, Fajarina
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
dani.vardiansyah@esaunggul.ac.id

Abstract

In connection with the dropout rate in DKI Jakarta caused by the poverty level, the DKI Jakarta government in December 2012 has released a new program called the Jakarta Smart Card (KJP), which is one of the Personal Education Funding Assistance. With this policy, the Jakarta Government provides access for DKI Jakarta residents who cannot get education at least up to Senior High Schools or Vocational Schools. This assistance is fully supported by DKI Jakarta's national income. The aim of the Jakarta Smart Card program is considered as an effort to improve the community, especially students who come from families who need to complete 12-year compulsory education in DKI Jakarta. The purpose of this community service is to find out the implementation of KJP policies in the Central Jakarta region in 2018 and also to find out the constraints and supporting factors of this policy. The results of the policy evaluation indicate that the KJP Policy for the Central Jakarta region has not been successful. Therefore, there are many differences between normative goals and empirical situations in society. This mismatch occurs because of constraints in KJP implementation. For example: (1) the lack of human and financial resources to support the KJP Program for the period 2018, (2) the process of selecting SKJ-based KJP recipients and photographic evidence involving some misunderstandings of students as recipients. incompetent even though they already have SKTM and photographic evidence, (3) the distribution of KJP funds in 2018 has been delayed because there are still many schools that propose KJP programs outside of school records and that causes multiple account problems, (4) lack of observations for this program either from school or Education Services.

Keywords : *monitoring, evaluation, jakarta smart card (KJP)*

Abstrak

Sehubungan dengan angka putus sekolah di DKI Jakarta yang disebabkan oleh tingkat kemiskinan maka pemerintah DKI Jakarta pada Desember 2012 telah merilis program baru yang disebut dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan salah satu Bantuan Pendanaan Pendidikan Pribadi. Dengan kebijakan ini, Pemerintah Jakarta memberikan akses bagi warga DKI Jakarta yang tidak bisa mendapatkan pendidikan setidaknya sampai Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Kejuruan. Bantuan ini sepenuhnya didukung oleh pendapatan nasional DKI Jakarta. Tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan masyarakat terutama siswa yang berasal dari keluarga yang membutuhkan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun di DKI Jakarta. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan KJP di wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2018 dan juga untuk mengetahui kendala dan faktor pendukung dari kebijakan ini. Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa Kebijakan KJP untuk wilayah Jakarta Pusat belum berhasil. Karena itu ditemukan banyak perbedaan antara tujuan normatif dan situasi empiris dalam masyarakat. Ketidaksesuaian itu terjadi karena kendala dalam implementasi KJP. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Program KJP di Jakarta Pusat misalnya: (1) kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung Program KJP untuk periode 2018, (2) proses pemilihan penerima KJP berbasis SKTM dan bukti foto melibatkan beberapa kesalahpahaman siswa sebagai penerima yang tidak kompeten walaupun mereka sudah memiliki SKTM dan bukti foto, (3) distribusi dana KJP pada tahun 2018 mengalami keterlambatan karena masih banyak sekolah yang mengusulkan program KJP di luar catatan sekolah dan itu menyebabkan masalah akun ganda, (4) kurangnya pengamatan untuk program ini baik dari sekolah atau Layanan Pendidikan.

Kata kunci : *monitoring, evaluasi, kartu jakarta pintar (KJP)*

Pendahuluan

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi program unggulan Gubernur Jokowi (sekarang Presiden RI) dan sekaligus ikon baru strategi pembangunan Jakarta yang berpihak pada warga marjinal ibukota. Di samping itu, anggaran yang telah dicanangkan untuk Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini juga sangat besar, dimana untuk tahun 2015 telah dianggarkan sebesar 2,3 Triliun rupiah.

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi bagian dari kegiatan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya kegiatan ini dalam RPJMD tahun 2013-2017 dan juga telah mendapatkan dukungan anggaran dalam APBD dimulai sejak tahun 2013 dimana pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, Program ini khusus diperuntukkan bagi anak usia sekolah SD hingga SMA atau yang sederajat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak

mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus.

Dari berbagai liputan media, dalam penerapannya dijumpai berbagai hambatan, penyimpangan dan ukuran indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Oleh karena itu, untuk memperlancar serta menghindari penyimpangan pada saat pelaksanaan program, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penelitian lebih lanjut tentang KJP Plus ini khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah berbentuk monitoring yang dilaksanakan pada bulan November 2018.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Wawancara dan Interpretasi

Tabel 1
Hasil Wawancara dan Quisioner Siswa

Menggunakan handphone		Siapa yang memegang KJP-nya		Keterlambatan dalam menerima KJP		Kesulitan dalam pengajuan KJP	
Ya	Tidak	Anak	Orangtua	Pernah	Tidak pernah	Sulit	Tidak sulit
11/17	6/17	1/17	16/17	10/17	7/17	2/17	15/17
65%	35%	6%	94%	59%	41%	12%	88%

Evaluasi data tabel 1 :

1. Dari wawancara yang dilakukan ternyata cukup banyak siswa yang sudah memiliki handphone, sebaiknya orang tua dan guru dapat menjaga anak/siswa dan siswinya dalam penggunaan handphone tersebut agar tidak mengganggu proses belajar, hal ini akan dapat membantu berjalannya tujuan dari bantuan dana KJP Plus.
2. Hampir keseluruhan dana bantuan KJP Plus ini di pegang dan di kelola langsung oleh pihak orang tua, sebagai orang tua yang bijak mereka harus bisa mempergunakan dana bantuan tersebut dengan tepat, seperti membeli perlengkapan sekolah anak, dan membelikan sembako agar anak-anak bisa makan makanana yang bergizi, serta tidak menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk hal-hal pribadi.

3. 59% siswa mengatakan pernah mengalami keterlambatan pencairan dana bantuan KJP Plus, dan banyak orang tua yang mengeluhkan mengapa danatersebut tidak turun dengan tanggal yang tepat namun selalu berubah-ubah. Untuk pemerintah sebaiknya harus bisa merencanakan pencairan dana tersebut dengan baik, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat.

Tabel 2
Hasil Wawancara Guru

Tingkat sekolah	Asal sekolah	Jabatan	Quisioner	
			Mensosialisasikan penggunaan KJP	Melakukan survey
SD/MI	SDN 09 Cideng	Wali Kelas	Sudah	Sudah
	SDS Darussalam	Guru Olahraga	Sudah	Sudah
	SDN 04 Cideng	Guru Agama	Sudah	Sudah
SMP/MTS	MTSN 9 Jakarta	Guru	Sudah	Sudah
	SMP PGRI 32	Guru	Sudah	Sudah
	SMPN 181 Jakarta	Guru	Sudah	Sudah
SMA/SMK/MA	MAS Jamiat Kheir	Tata Usaha	Sudah	Sudah
	SMAN 25 Jakarta	Tata Usaha	Sudah	Sudah
	SMA YP IPPI	Guru BK	Sudah	Sudah

	Keterangan	Persentase
Kesulitan	Pengajuan SKTM ke pihak Kelurahan	50%
	Prosedur upload satu persatu data siswa yang ingin mengajukan KJP	100%
Kemudahan	Adanya akses internet	100%
	Adanya sistem Online	100%
	Mudahnya pencarian informasi	85%

Evaluasi data tabel 2 : Pihak sekolah sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk membantu siswa dan siswinya agar mendapatkan bantuan dana KJP Plus yang diharapkan agar siswa-siswinya semakin semangat

sekolah dan menuntuk ilmu.Namun ada beberapa kesulitan dan keluhan dari sekolah yang mengatakan bahwa proses penguploadan data siswa cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien dan mengganggu jam kerja sekolah.

Tabel 3
Hasil Wawancara Orang Tua

Memegang KJP Anak		Pendapatan Per Bulan		Alat Elektronik Di Rumah Yang Dimiliki		
Ya	Tidak	<Rp. 2.000.000	>Rp. 2.0000.000	Kulkas	AC	Televisi
12/17	5/17	8/16	8/16	16/16	0/16	16/16
71%	29%	50%	50%	100%	0%	100%

Kendaraan Yang Dimiliki		Status Tempat Tinggal		Melaporkan KJP Anak Yang Digunakan	
Sepeda motor	Tidak ada	Sewa	Milik sendiri	Ya	Tidak
14/16	Feb-16	Apr-16	Des-16	16/16	0/16
88%	12%	25%	75%	100%	0%

Evaluasi data tabel 3 :

Jika dilihat dari tabel tersebut, bisa dikatakan bahwa banyak dari orang tua siswa yang memang bisa dikatakan cukup mampu, namun kembali lagi kepada orang tua, diharapkan orang tua bisa mengelola dana bantuan KJP Plus tersebut untuk hal-hal perkembangan sekolah anak, yang diharapkan agar anak-anak mereka bisa lebih rajin serta semangat dalam menuntut ilmu.

Tingkat Sekolah Dasar dan Interpretasi

a. Monitoring

Kegiatan Monitoring yang kami lakukan di tingkat Sekolah Dasar adalah :

1. Melakukan survei lokasi Sekolah Dasar di wilayah Jakarta Pusat
2. Melakukan wawancara secara langsung dengan Guru dan Murid penerima KJP Plus
3. Memberikan Quesioner yang harus di isi oleh Guru dan Siswa
4. Melakukan survey langsung ke rumah Siswa yang sudah diwawancarai
5. Melakukan survey ke RT terdekat dari salah satu rumah Siswa
6. Kegiatan monitoring ini kami lakukan agar mendapatkan data real tentang penggunaan KJP Plus tingkat sekolah Dasar. Dan mengetahui apakah program bantuan KJP ini berjalan sesuai dengan tujuan dari KJP atau tidak.

Hasil Monitoring :

1. 2 dari 6 siswa yang di wawancarai menggunakan handphone
2. Penggunaan kartu KJP plus seluruh siswa tingkat SD di pegang ./ di kelola langsung oleh orang tua
3. Seluruh siswa dan orang merasa terbantu dengan adanya program bantuan dana KJP Plus.
4. Dengan adanya bantuan dana KJP Plus ini siswa di tingkat SD jadi lebih semangat untuk sekolah, karena adanya bantuan KJP Plus ini siswa siswi bisa membeli perlengkapan sekolah secara lengkap dan gratis.
5. Terdapat keluhan dari guru yang mengurus pengajuan dana bantuan KJP Plus antara lain:
 - a. Sulitnya proses penguploadan data siswa yang ingin mengajukan bantuan, proses upload yang harus di lakukan satu persatu sehingga memakan waktu yang cukup lama.
 - b. Banyak orang tua yang mengeluh kepada guru tersebut apabila adanya keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus

6. Seluruh orang tua siswa melaporkan penggunaan KJP Plus tersebut kepada pihak sekolah.

b. Evaluasi

Dari hasil monitoring yang sudah kami lakukan ditingkat SD dengan data di atas, maka yang harus di evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa membuat sistem pengajuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien agar guru dari pihak-pihak sekolah yang ingin mengajukan KJP Plus dapat bekerja dengan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama.
2. Harus adanya kejelasan tanggal dan jumlah dana KJP yang cair agar semua pihak mengetahui kapan dana tersebut akan cair.

Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Interpretasi

1. Monitoring

Kegiatan Monitoring yang kami lakukan di tingkat Sekolah Dasar adalah :

- a. Melakukan survei lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Jakarta Pusat
- b. Melakukan wawancara secara langsung dengan Guru dan Murid penerima KJP Plus
- c. Memberikan Quesioner yang harus di isi oleh Guru dan Siswa
- d. Melakukan survey langsung ke rumah Siswa yang sudah diwawancarai

Kegiatan monitoring ini kami lakukan agar mendapatkan data real tentang penggunaan KJP Plus tingkat sekolah Dasar. Dan mengetahui apakah program bantuan KJP ini berjalan sesuai dengan tujuan dari KJP Plus atau tidak.

Hasil Monitoring :

1. 3 dari 5 siswa yang di wawancarai menggunakan handphone
2. 1 dari 5 siswa tingkat SMP yang mendapatkan bantuan dana KJP Plus, kartu dan uang KJP Plus tersebut di pegang ./ di kelola langsung oleh orang tua
3. Seluruh siswa dan orang tua merasa terbantu dengan adanya program bantuan dana KJP Plus ini.
4. Dengan adanya bantuan dana KJP Plus, siswa di tingkat SMP jadi lebih semangat untuk sekolah, karena adanya bantuan KJP Plus sehingga siswa bisa membeli perlengkapan sekolah secara lengkap dan gratis.
5. Terdapat keluhan dari guru yang mengurus pengajuan dana bantuan KJP Plus antara lain:

- a. Sulitnya proses penguploadan data siswa yang ingin mengajukan bantuan, proses uploada yang harus di lakukan satu persatu sehingga memakan waktu yang cukup lama.
- b. Banyak orang tua yang mengeluh kepada guru tersebut apabila adanya keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus
- c. Seluruh orang tua siswa melaporkan penggunaan KJP Plus tersebut kepada pihak sekolah.
4. Dengan adanya bantuan dana KJP Plus ini siswa di tingkat SMA jadi lebih semangat untuk sekolah, karena adanya bantuan KJP Plus sehingga siswa bisa membeli perlengkapan sekolah secara lengkap dan gratis.
5. Seluruh orang tua siswa melaporkan penggunaan KJP Plus tersebut kepada pihak sekolah setiap bulannya.
6. Terdapat keluhan dari guru yang mengurus pengajuan dana bantuan KJP Plus antara lain :
 - a. Sulitnya proses penguploadan data siswa yang ingin mengajukan bantuan, proses uploada yang harus di lakukan satu persatu sehingga memakan waktu yang cukup lama.
 - b. Banyak orang tua yang mengeluh kepada guru tersebut apabila adanya keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus

2. Evaluasi

Dari hasil monitoring yang sudah kami lakukan ditingkat SD dengan data di atas, maka yang harus di evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa membuat sistem pengajuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien agar guru dari pihak-pihak sekolah yang ingin mengajukan KJP Plus dapat bekerja dengan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama.
2. Harus adanya kejelasan tanggal dan jumlah dana KJP yang cair agar semua pihak mengetahui kapan dana tersebut akan cair.

Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Interpretasi

1. Monitoring

Kegiatan Monitoring yang kami lakukan di tingkat Sekolah Menengah Atas adalah:

- a. Melakukan survei lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Jakarta Pusat
- b. Melakukan wawancara secara langsung dengan Guru dan Murid penerima KJP Plus
- c. Memberikan Quesioner yang harus di isi oleh Guru dan Siswa
- d. Melakukan survey langsung ke rumah Siswa yang sudah diwawancarai

Kegiatan monitoring ini kami lakukan agar mendapatkan data real tentang penggunaan KJP Plus tingkat sekolah Dasar. Dan mengetahui apakah program bantuan KJP ini berjalan sesuai dengan tujuan dari KJP atau tidak.

Hasil Monitoring :

1. Seluruh siswa penerima bantuan dana KJP Plus di tingkat SMA yang di wawancarai menggunakan handphome, dan dari monitor yang kami lakukan ternyata jenis handphome yang mereka gunakan bisa dibilang cukup mahal.
2. Penggunaan kartu KJP plus seluruh siswa tingkat SMA di pegang / di kelola langsung oleh orang tua
3. Seluruh siswa dan orang merasa terbantu dengan adanya program bantuan dana KJP Plus.

2. Evaluasi

Dari hasil monitoring yang sudah kami lakukan ditingkat SD dengan data di atas, maka yang harus di evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus bisa membuat sistem pengajuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien agar guru dari pihak-pihak sekolah yang ingin mengajukan KJP Plus dapat bekerja dengan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama.
- b. Berbeda dengan tingkat SD dan SMP, siswa penerima KJP Plus di tingkat SMA ini harus lebih diawasi dan di pantau penggunaannya karena siswa SMA jauh lebih paham, dan terkadang mereka suka menyalahgunakan penggunaan dana KJP Plus ini di luar dari ketentuan pemerintah.
- c. Orang tua siswa juga harus lebih mawas diri terhadap anaknya apabila anak tersebut menyalahgunakan penggunaan bantuan dana KJP Plus ini
- d. Harus adanya kejelasan tanggal dan jumlah dana KJP yang cair agar semua pihak mengetahui kapan dana tersebut akan cair.

Kelompok Luar Sekolah dan Interpretasi

1. Monitoring

Kegiatan Monitoring yang kami lakukan dari kelompok luar sekolah adalah :

- a. Melakukan survei lokasi langsung ke Ketua RT dari lokasi rumah siswa-siswi yang sudah di wawancarai di sekolah.
- b. Melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua RT.
- c. Memberikan Quesioner yang harus di isi oleh Ketua RT.

Kegiatan monitoring ini kami lakukan agar mendapatkan data real tentang penggunaan KJP Plus tingkat sekolah Dasar. Dan mengetahui apakah

program bantuan KJP ini berjalan sesuai dengan tujuan dari KJP Plus atau tidak.

Hasil Monitoring :

1. Dari 5 orang ketua RT yang di wawancarai, mereka mengatakan bahwa di daerahnya sudah mendapatkan bantuan dana KJP Plus bagi warganya yang kurang mampu.
2. Mereka menyatakan bahwa mereka memudahkan warganya untuk mengajukan SKTM. Namun ada beberapa orang tua yang masih mengeluh karena ketua RT sulit di temui jika mereka ingin mengajukan surat SKTM.

Tabel 4
Data Penerima KJP Plus tepat sasaran

Tingkat Sekolah	Jumlah Narasumber	Yang berhak	Hasil
SD	5 Orang	5 Orang	100%
SMP	6 Orang	5 Orang	83%
SMA/SMK	5 Orang	5 Orang	100%

Dari tabel 4 Target sasaran Penprov DKI Jakarta terpenuhi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sudah mendapatkan KJP, Tingkat SD dan SMA/SMK 100% Tidak ditemukan nya permainan curang dalam mendapatkan KJP Plus, hanya ada satu dari tingkat SMP kami mendapati siswa yang tergolong mampu pernah mendapat KJP karena siswa tersebut berprestasi, maka dengan itu jumlah untuk presentase tingkat SMP 83%.

Tabel 5
Data Pengetahuan Wali Murid tentang pencairan dana

Tingkat Sekolah	Jumlah Narasumber	Jumlah tidak tahu	Hasil
SD	5 Orang	4 Orang	80%
SMP	6 Orang	4 Orang	66%
SMA/SMK	5 Orang	3 Orang	60%

Dari tabel Tabel 5 di dapatkan hasil bahwa wali murid tidak mengetahui kapan pencairan dana yang nanti nya akan turun dan di berikan, atau kurangnya informasi yang jelas dan akurat dari penprov perihal informasi tersebut jumlah presentase ketidaktahuan cukup tinggi.

Tingkat ketidaktahuan pengetahuan informasi untuk tingkat SD 80%, untuk tingkat SMP 66% dan SMA 60%.

Tabel 6
Data Rukun Tetangga Wilayah Jakarta Pusat

Keterangan	Jumlah	Presentase
Memiki Data Warga Putus Sekolah	3 dari 6 RT	50%
Warga Yang Berhak Dapat KJP Tapi Belum Dapat	0 dari 6 RT	0%
Kendala Sebagai RT Tentang Pembuatan KJP Plus	0 dari 6 RT	0%

Dari tabel 6 Data Rukun Tetangga yang kami survey, RT setempat memiliki data warga putus sekolah sebanyak 50%, Warga yang berhak dapat tetapi belum dapat 0% semua warga yang berhak dapat sudah mendapatnya, dan untuk kendala RT tentang pembuatan KJP Plus 0%, di artikan RT setempat tidak memiliki hambatan atau kendala terkait program penprov tersebut .

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai monitoring dan evaluasi KJP Plus di Wilayah Jakarta Pusat maka disimpulkan Kebijakan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Jakarta Pusat Pada Periode Tahun Ajaran 2018 dapat dikatakan sudah berhasil. Karena memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan tidak mampu untuk bersekolah. Sangat diharapkan dengan adanya program bantuan KJP ini dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa serta mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan karna faktor biaya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) wilayah Jakarta Pusat antara lain dapat dilihat dari : (1) Sosialisasi terhadap kelompok sasaran, (2) Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan KJP, (3) Komunikasi atau koordinasi yang baik antar pelaksanaan kebijakan KJP.

Daftar Pustaka

kjp.jakarta.go.id

Kriyantono, R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Ruslan, Rosady. (2010). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, Conan Aditya. (2016). *Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Studi Berbasis BAN-PT* (<http://e-journal.uajy.ac.id/10924/4/3TF06794.pdf>)